

**PENGARUH PENERAPAN DIGITALISASI
PENGENDALIAN BELANJA TERHADAP EFISIENSI
PENGELOLAAN ANGGARAN PADA BALAI
KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN (BK HIT)
SULAWESI UTARA**

Oleh:

Mihcellin Brigita Mawar Londok

NIM. 21 043 045



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2025**

HALAMAN JUDUL

**PENGARUH PENERAPAN DIGITALISASI PENGENDALIAN
BELANJA TERHADAP EFISIENSI PENGELOLAAN ANGGARAN
PADA BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN
(BKHIT) SULAWESI UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Terapan
Pada Program Studi Akuntansi Keuangan**

Oleh:

Mihcellin Brigita Mawar Londok

NIM. 21 043 045



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Dengan Judul

**PENGARUH PENERAPAN DIGITALISASI PENGENDALIAN
BELANJA TERHADAP EFISIENSI PENGELOLAAN ANGGARAN
PADA BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN
SULAWESI UTARA**

Oleh

Nama : Mihcellin Brigita Mawar Londok
NIM : 21 043 045
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan

Disetujui untuk Diujikan

Manado, 2025

Pembimbing 1



Susy A. Marentek, SE.,MSA
NIP. 19661012 199702 001

Pembimbing 2



Stevie kaligis, SE.,MM.,Ak.,CA
NIP. 1967204152002121001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi
Akuntansi Keuangan



Prof. Dr. Hedy Desiree Rumambi, SE.,MM.,AK.,CA.,CSRS
NIP. 19700205 199802 2 002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul

**PENGARUH PENERAPAN DIGITALISASI PENGENDALIAN BELANJA
TERHADAP EFISIENSI PENGELOLAAN ANGGARAN PADA BALAI
KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN (BK HIT) SULAWESI UTARA**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Tim Penguji Akhir

Pada hari Hari, Jumat 18 juli 2025 pukul 09:00 – 11:00 di Jurusan Akuntansi.

Oleh

Mihcellin Brigita Mawar Londok
210 430 45

Dan yang bersangkutan dinyatakan .

LULUS

Tim Penguji Akhir

Ketua Sidang/Penguji: Jeffry Otniel Rengku, SE.Ak.,MM
NIP 196309241994031001

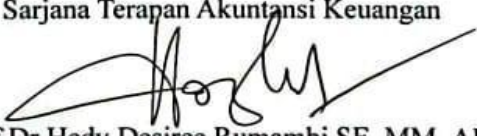
Penguji I : Jacqueline Greety Wenas, Se.,MSA
NIP 196904072008122001

Penguji II : Dr. Dra. Rolina Emmy Manggopa, M.Pd
NIP. 196208011988032003



Mengetahui
JURUSAN AKUNTANSI

Koordinator Prodi
Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan


Prof Dr Hedy Desiree Rumambi, SE., MM., AK
NIP 197002051998022000

Ketua Jurusan

Raymond Festus Rombot, SE.,MSi
NIP. 197403142003121002

Sekretaris Jurusan


Joseph Nugraha Tangon, SE.,MSA
NIP. 196610121997021001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah orisinal, merupakan hasil karya saya sendiri, Tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam tugas akhir ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustakanya.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur plagiasi, saya bersedia tugas akhir ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manado, 17 Juli 2025

Penulis



Nama Mihcellin B M Londok

NIM 21 043 045

ABSTRAK

Mihcellin Brigita Mawar Londok, 2025. **Pengaruh Penerapan Digitalisasi Pengendalian Belanja Terhadap Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara.**

Skripsi, Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado. Dibimbing Oleh Pembimbing I: Susy A. Marentek, SE.,MSA dan Pembimbing II: Stevie Kaligis, SE.,MM.,Ak.,CA

Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis pengaruh penerapan digitalisasi pengendalian belanja terhadap efisiensi dan transparansi pelaksanaan anggaran; serta menilai sejauh mana penerapan digitalisasi mampu mengurangi risiko korupsi dan meningkatkan akurasi laporan keuangan di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara (BKHIT Sulut).

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan metode analisis regresi sederhana. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner kepada 36 responden yang merupakan pegawai BKHIT Sulut. Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian valid dan sangat reliabel. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa digitalisasi pengendalian belanja berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pengelolaan anggaran, dengan nilai signifikansi 0,000 dan koefisien determinasi (R^2) sebesar 67,8%.

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi pengendalian belanja memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran, serta mampu mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan akurasi pelaporan keuangan. Penelitian ini memperkuat teori Technology Acceptance Model (TAM) dan memberikan rekomendasi untuk memperluas implementasi digitalisasi pada instansi pemerintah sejenis.

Kata kunci: Digitalisasi, Pengendalian Belanja, Efisiensi, Transparansi, Laporan Keuangan

ABSTRACT

Mihcellin Brigita Mawar Londok, 2025. The Influence of Digitalization in Expenditure Control on Budget Management Efficiency at the Animal, Fish, and Plant Quarantine Agency of North Sulawesi

Thesis, Applied Bachelor's Program in Financial Accounting, Department of Accounting, State Polytechnic of Manado. Supervised by: Susy A. Marentek, SE.,MSA (Advisor I) and Stevie Kaligis, SE.,MM.,Ak.,CA (Advisor II).

This study aims to analyze the influence of digitalization in expenditure control on the efficiency and transparency of budget implementation, and to assess the extent to which digitalization can reduce the risk of corruption and improve the accuracy of financial reporting at the Animal, Fish, and Plant Quarantine Agency of North Sulawesi (BKHIT Sulu).

This is a quantitative descriptive study using simple regression analysis. Data was collected through questionnaires distributed to 36 respondents, all of whom are employees of BKHIT Sulu. The results of the validity and reliability tests showed that all research instruments are valid and highly reliable. Regression analysis revealed that digitalization of expenditure control has a significant effect on budget management efficiency, with a significance value of 0.000 and a coefficient of determination (R^2) of 67.8%.

Based on these findings, it can be concluded that the digitalization of expenditure control positively impacts the efficiency and transparency of budget management, while also reducing the potential for corruption and improving the accuracy of financial reporting. This study supports the Technology Acceptance Model (TAM) and provides recommendations for expanding digitalization implementation across similar government institutions.

Keywords: Digitalization, Expenditure Control, Efficiency, Transparency, Financial Reporting.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Mihcellin Brigita Mawar Londok
Tempat/Tanggal Lahir : Leleoto, 16 Maret 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Jl. Pameran Kairagi II lingkungan V
Email : londokmihcellin@gmail.com
No. Telepon : 0895-0973-6451
Hobi : Menyanyi
Nama Ayah : Oktavianus Londok
Nama Ibu : Norfina Amik

Riwayat Pendidikan :

SD : SD Gmim 48 Kairagi
SMP : SMP N 13 Manado
SMA : SMA N 8 Manado
PERGURUAN TINGGI : Politeknik Negeri Manado

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

In the Name Of Jesus christ

“Direndahkan dimata Manusia, ditinggikan dimata Tuhan, *Prove Them Wrong*”

Sebab Aku ini, Tuhan, Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu:

“Janganlah takut, Akulah yang menolong engkau”

(yesaya 41:13)

“Jangan takut percaya saja”

(Markus 5:36)

“Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia”

(Kolose 3:23)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab firman-Mu berkata “Jangan takut, sebab Aku menyertai engkau, jangan bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan” dan yang senantiasa mengiring langkah-langkah serta proses penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak ada kata yang cukup besar untuk menggambarkan betapa besar kasih dan penyertaan Tuhan dari awal hingga akhir dari perjuangan ini.
2. Kepada kedua orang tuaku papa Octavianus Londok dan mama Norfina Amik, terima kasih yang tak terhingga untuk setiap kasih, cinta, dan sayang dari mama dan papa, terima kasih untuk setiap usaha pengorbanan, terima kasih untuk nasehat, didikan dan doa yang senantiasa di panjatkan kepada Tuhan untuk penulis, mama dan papa adalah alas dari semua pencapaianku. Skripsi ini adalah wujud kecil dari segala kasih sayang dan pengorbanan kalian yang tidak pernah putus. I love You

3. Kepada adikku yang tersayang Velove Injilia Londok, terima kasih untuk semuanya lope. Walaupun kadang tidak akur terima kasih untuk supportnya Untuk adik Joshua Gaghana, terima kasih sudah mau di repotkan, terima kasih tidak pernah mengeluh saat kakak butuh bantuan dan selalu siap untuk di repotkan. Love you kalian berdua
4. Kepada kakak Eksel dan Olivia terimakasih banyak atas dukungan dan support serta motivasi dan juga bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
5. Kepada Ma epit dan Pa ara terima kasih untuk cinta dan kasih sayang terima kasih untuk supportnya dan bimbingan kepada penulis.
6. Kepada Anugerah Mantiri terima kasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkelu kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan supportnya dan seluruh hal baik yang diberikan selama ini.
7. Kepada teman-teman Novelin, Injil, Meitilda, Jenifer terima kasih atas segala motivasi,dukungan,waktu dan ilmu yang dijalani selama 4tahun ini dalam masa perkuliahan. Terima kasih selalu jadi garda terdepan di masa-masa sulit dalam masa perkuliahan dan terima kasih selalu mendengarkan kelu kesah penulis.
8. Terakhir untuk Mihcellin Brigita Mawar Londok ya diri saya sendiri untuk setiap tetes air mata yang jatuh dalam diam, untuk hari-hari yang panjang yang penuh rasa lelah, ragu dan ingin menyerah, Sangat bangga karena telah memilih untuk tetap bertahan. Terima kasih karena sudah berjuang sejauh ini, karena tidak berhanti meski jalannya terasa berat, terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Skripsi ini adalah hasil dari semua ketekunan, doa, dan tekad yang tidak terlihat oleh siapa pun, tetapi sangat berarti. Ini bukan hanya tentang gelar, tetapi tentang keberhasilan dan pencapaian atas diri saya sendiri

Akhirnya, skripsi ini sayaa persembahkan sebagai bentuk rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua yang telah menjadi bagian penting dalam proses pembentukan diri dan pencapaian ini. Semoga ini menjadi awal dari langkah-langkah keberhasilan untuk kedepannya.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur di Panjatkan kehadiran Tuhan yang maha kuasa karena kebaikan serta Penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Penerapan Digitalisasi Pengendalian Belanja Terhadap Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Sulawesi Utara”***.

Penulis berkerinduan menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Dra. Maryke Alelo, MBA selaku Direktur Politeknik Negeri Manado.
2. Dr. Diane Tangian, SH., M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Akademik.
3. Selvy Kalele, SE.,MSi selaku wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
4. Rudolf Estephanus Golioth Mait, ST., MT selaku Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
5. Juliet P.T. Makinggung, SE., M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
6. Raymond Festus Rombot, SE.,MSi selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
7. Jerry Sonny Lintong, SE., MAP, CRA., CRP selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
8. Prof. Dr. Hedy D. Rumambi, SE., Ak., MM, CA., CSRS selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan.
9. Alpindos Toweula, SE.,MM.,Ak.,CA., BKP selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan.
10. Merry Ligia Sael, SE.,M.Si selaku Koordinator Program Studi Diploma III Akuntansi.
11. Johanes H. Tene, SE.,MSA.,AK.,CA., BKP selaku Kepala Laboratorium Akuntansi Keuangan.
12. Esrie A. N. Limpeleh, SE.,MM selaku Kepala Laboratorium Aplikasi Pengolahan Data.
13. Jacqueline G. Wenas, SE.,MSA selaku Kepala Laboratorium Sistem Informasi Akuntansi. Serta sebagai penguji 1
14. Dr. Ivonne H. Putong, SE.,AK.,M.,Ak CA selaku Kepala Laboratorium Pajak.

15. Antonius A. Tandi, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Kepala TUK Akuntansi.
16. Dra. Revleen M. Kaparang, M.Pd selaku Ketua Panitia Magang.
17. Susy A. Marentek, SE.,MSA selaku Dosen Pembimbing 1
18. Stevie kaligis, SE.,MM.,Ak.,CA selaku Dosen Pembimbing 2
19. Jeffry Otniel Rengku, SE.Ak.,MM selaku Ketua Penguji
20. Dr. Dra. Rolina Emmy Maanggopa, M.Pd selaku Penguji 2
21. Jolly Lucky Raymond Turangan SH,M.Hum selaku dosen wali
22. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Jurusan Akuntansi.
23. Dan lain-lain bisa ditambahkan oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi terciptanya skripsi yang baik. Akhir kata, Penulis ucapkan terima kasih.

Manado, Juli 2025

Mihcellin B M Londok

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Kegunaan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Teori Akuntansi Pemerintahan	6
2.1.1 Akuntansi Pemerintah pada Satker Pemerintah Pusat sebagai UPT	6
2.1.2 Akuntabilitas dalam Akuntansi Pemerintahan	7
2.1.3 Transparansi dalam Akuntansi Pemerintahan	7
2.1.4 Siklus Akuntansi Pemerintahan	8
2.1.5 Indikator Efisiensi Pengelolaan Anggaran	8
2.1.6 Model Penerimaan Teknologi (Technology Acceptance Model-TAM)	9
2.1.7 Pengendalian Belanja	10
2.1.8 Teori Transformasi Digital dalam Sektor Publik	12
2.2 Penelitian Terdahulu	13
2.3 Kerangka Berpikir Penelitian	14
2.4 Hipotesis	14
BAB III METODE PENELITIAN	14

3.1 Jenis Penelitian	15
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	15
3.3 Populasi dan Sampel	15
3.4 Teknik Pengumpulan Data	15
3.5 Alat Pengukur Data	16
3.6 Teknik Analisis Data	20
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	21
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	21
4.2 Hasil Penelitian.....	27
4.3 Pembahasan	40
4.3.1 Analisis Temuan Penelitian.....	40
4.3.2 Implikasi Penelitian.....	41
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	43
5.1 Kesimpulan.....	43
5.2 Rekomendasi	43
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN	47

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Anggran Sebelum dan Sesudah Efisiensi.....	28
Tabel 4. 2 Komposisi Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	31
Tabel 4. 3 Hasil Uji Validitas	32
Tabel 4. 4 Tingkat Reliabilitas Cronch's Alph.....	33
Tabel 4. 5 Hasil Uji Reliabilitas	33
Tabel 4. 6 Hasil Uji Regresi Sederhana.....	35
Tabel 4. 7 Hasil Uji F	36
Tabel 4. 8 Hasil Uji Hipotesis	37
Tabel 4. 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi	37
Tabel 4.10 Perbandingan Anggaran.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Logo Balai Karantina.....	23
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi.....	26
Gambar 4. 3 Format RKA- K/L	27
Gambar 4. 4 Display MINDA.....	30
Gambar 4. 5 Histogram	34
Gambar 4. 6 Normal P-P Plot Of Regression Standardizes Residual	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Kusioner Penelitian/Data Sekunder	47
Lampiran 1. 2 Hasil Tabulasi Data Penelitian.....	49
Lampiran 1. 3 Hasil Penelitian	50
Lampiran 1. 4 Surat Plagiarisme	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan transformasi digital di era modern telah menjadi kebutuhan strategis guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Di Indonesia, berbagai pemerintah daerah maupun instansi vertikal seperti Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara (BKHIT Sulut) masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan anggaran akibat sistem pengendalian belanja yang manual dan kurang adaptif. Kondisi ini tercermin dari ketidakmampuan dalam memantau alokasi dana secara langsung, rendahnya akuntabilitas, serta tingginya potensi kesalahan administratif yang menghambat pemanfaatan anggaran secara optimal. Mengingat pentingnya pengendalian keuangan dalam menunjang fungsi karantina yang berperan penting dalam menjaga sumber daya alam dan kesehatan masyarakat, digitalisasi menjadi alternatif solusi yang menjanjikan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 menegaskan pentingnya semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk meninjau alokasi anggaran sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pengeluaran publik yanggilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025).

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Sulawesi Utara sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian telah menerapkan sistem digital dalam pengelolaan anggaran belanja untuk mendukung transparansi dan mempercepat proses administrasi. Penerapan sistem digital dilakukan mulai dari proses perencanaan anggaran dalam RKA-K/L,

pengajuan kegiatan, verifikasi dokumen, hingga pelaporan melalui aplikasi keuangan berbasis elektronik.

Penerapan digitalisasi dalam pengendalian belanja memiliki sejumlah kelebihan:

1. Sistem digital mampu mempercepat proses administrasi, karena data dapat diinput dan diverifikasi secara real-time tanpa ketergantungan pada dokumen fisik.
2. Tingkat akurasi data meningkat, sehingga meminimalkan risiko kesalahan pencatatan atau manipulasi.
3. Sistem digital memungkinkan pelacakan transaksi secara transparan, yang memperkuat fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

Selain itu, digitalisasi juga memberikan efisiensi biaya operasional, dengan mengurangi penggunaan kertas, pengarsipan fisik, dan perjalanan dinas administratif (Zein, Anggraini, & Malau, 2025; Nugroho & Dwinanda, 2025).

Di balik berbagai keunggulan tersebut, digitalisasi juga memiliki kelemahan atau tantangan:

1. Ketergantungan terhadap infrastruktur teknologi dan jaringan internet, yang bila terganggu dapat memperlambat seluruh proses pengendalian belanja.
2. Tingkat literasi digital SDM yang masih beragam dapat mempengaruhi keefektifan sistem.
3. Terdapat juga hambatan berupa resistensi terhadap perubahan, khususnya pada pegawai yang terbiasa dengan sistem manual.

Dalam beberapa kasus, interoperabilitas sistem yang kurang optimal juga menghambat integrasi data antara unit kerja yang berbeda (Hutabaratetal., 2025; Nugroho & Dwinanda, 2025).

Permasalahan utama yang muncul dalam pelaksanaan anggaran di BKHIT Sulut adalah rendahnya efektivitas pengendalian belanja akibat ketergantungan pada sistem konvensional. Sistem manual rentan terhadap kesalahan input data, sulitnya *trasebels* (Traceability) transaksi, dan kurangnya integrasi informasi antar unit kerja, sehingga memperlambat pengambilan

keputusan. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengeluaran anggaran dapat memicu risiko terjadinya korupsi serta menimbulkan ketidaktepatan dalam penyusunan laporan keuangan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa digitalisasi di sektor publik belum berjalan maksimal karena masih terdapat kendala teknis dan terbatasnya pelatihan bagi aparatur, yang menuntut adanya studi empiris yang lebih terfokus.

Penelitian ini menjadi relevan dalam konteks ilmu akuntansi keuangan karena menyoroti peran teknologi dalam memperkuat mekanisme pengendalian internal dan akuntabilitas keuangan. Dalam perspektif akuntansi, digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi proses administrasi, tetapi juga memperkuat control internal melalui audit digital dan system pemantauan otomatis.

Berdasarkan uraian di atas, maka penting untuk dilakukan penelitian mengenai “Pengaruh Penerapan Digitalisasi Pengendalian Belanja terhadap Efisiensi Pengelolaan Anggaran pada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh penerapan system digitalisasi pengendalian belanja terhadap efisiensi dan transparansi pelaksanaan anggaran di BKHIT Sulut?
2. Sejauh mana penerapan digitalisasi mampu mengurangi resiko korupsi dan ketidakakuratan laporan keuangan pada pelaksanaan anggaran di instansi tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh penerapan system digitalisasi pengendalian belanja terhadap efisiensi dan transparansi pelaksanaan anggaran di BKHIT Sulut
2. Untuk menilai sejauh mana penerapan digitalisasi mampu mengurangi resiko korupsi dan meningkatkan akurasi laporan keuangan dalam konteks pengelolaan anggaran.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi teknis untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan transparansi pengelolaan anggaran di instansi pemerintah vertikal, sehingga memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan publik .
2. Hasil penelitian dapat menjadi pedoman praktis bagi BKHIT Sulut dalam merancang strategi digitalisasi pengendalian belanja, sehingga mengurangi risiko administratif, meningkatkan efisiensi alokasi anggaran, dan memperkuat kontrol internal .
3. Kontribusi teoritis dari penelitian ini terletak pada upayanya memperluas wawasan dalam ilmu akuntansi keuangan, dengan fokus pada pengaruh teknologi terhadap pengendalian internal dan tata kelola keuangan yang baik di sektor publik, yang dapat dijadikan landasan bagi penelitian lanjutan.
4. Dengan meningkatnya transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran di BKHIT Sulut, masyarakat dapat lebih memahami alokasi sumber daya untuk perlindungan sumber daya alam dan kesehatan, sehingga memperkuat partisipasi dan kepercayaan masyarakat pada institusi pemerintah .

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dalam bidang ilmu akuntansi.:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi. Contohnya: Menambah referensi dalam bidang akuntansi, khususnya terkait topik yang diteliti, Memberikan kontribusi dalam pengembangan teori atau model baru dalam sistem akuntansi, hasil penelitian ini berpotensi menjadi acuan penelitian berikutnya yang membahas isu-isu sejenis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perusahaan/organisasi/ instansi terkait. Contohnya: Membantu perusahaan atau UMKM dalam meningkatkan efisiensi pencatatan keuangan dan persediaan. Memberikan solusi atas permasalahan akuntansi yang dihadapi, misalnya dalam

pencatatan persediaan, pembuatan laporan keuangan, atau pengakuan hak karyawan. Memudahkan pemilik usaha dalam mengambil keputusan berdasarkan data akuntansi yang lebih akurat dan terstruktur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Akuntansi Pemerintahan

2.1.1 Akuntansi Pemerintah pada Satker Pemerintah Pusat sebagai UPT

Akuntansi pemerintahan adalah sistem pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas pemerintah, termasuk Balai Karantina. Tujuan utamanya adalah untuk:

1. Menyajikan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel
2. Menilai kinerja keuangan dan operasional instansi pemerintah
3. Memenuhi kewajiban pelaporan kepada publik dan lembaga pengawas

Akuntansi pemerintahan merupakan cabang ilmu akuntansi yang berfokus pada pengelolaan keuangan sektor publik. Perkembangan di Indonesia telah dimulai sejak masa kolonial Belanda. Ketika diperkenalkannya sistem pembukuan berpasangan (*double-entry bookkeeping*) untuk mengelola keuangan. Seiring dengan perubahan paradigma tata kelola pemerintah, akuntansi pemerintah terus mengalami evolusi untuk menjawab tantangan zaman. Menurut Sari dan Nugroho (2021).

Penerapan digitalisasi dalam sistem akuntansi pemerintahan terbukti meningkatkan efisiensi pelaporan dan mempercepat pencairan anggaran. Teknologi mendorong instansi pemerintah untuk memiliki sistem pelaporan yang real-time, mudah diaudit, dan terintegrasi secara nasional.

Satuan kerja atau (satker) Pemerintah Pusat adalah unit kerja kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan anggaran berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Satker berperan sebagai pelaksana teknis dalam operasional anggaran negara.

Sebagai bagian dari sistem keuangan negara, UPT wajib menerapkan akuntansi pemerintahan sesuai:

1. PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual

2. Permenkeu No. 222/PMK.05/2016 tentang sistem akuntansi pemerintahan
3. Implementasi teknologi digital dalam sistem seperti SAKTI, SPAN, dan MINDA.

2.1.2 Akuntabilitas dalam Akuntansi Pemerintahan

Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran berarti bahwa setiap penggunaan dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada public, auditor, dan pihak terkait lainnya. Dalam penelitian ini, akuntabilitas dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Pengendalian Belanja Internal yang Lebih ketat: Diigitalisasi memungkinkan monitoring anggaran secara real-time, sehingga meminimalisir penyimpangan
2. Pelaporan Keuangan yang Akurat dan Tepat Waktu: Sistem digital memungkinkan pencatatan otomatis dan pengurangan jumlah eror, sehingga data yang dihasilkan lebih akurat
3. Mekanisme Audit yang Lebih Mudah: Dengan digitalisasi, audit internal dan eksternal dapat dilakukan dengan lebih transparan, karena semua transaksi terdokumentasi secara sistematis

2.1.3 Transparansi dalam Akuntansi Pemerintahan

Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi keuangan yang dapat diakses oleh pihak berkepentingan. Digitalisasi dalam pengendalian belanja internal meningkatkan transparansi melalui:

1. Pelaporan keuangan yang mudah di akses: Digitalisasi memungkinkan public dan stakeholder terkait untuk melihat bagaimana anggaran dikelola dan digunakan
2. Mengurangi kesempatan korupsi: Dengan adanya rekam jejak transaksi yang terdokumentasi secara digital, peluang manipulasi atau penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisir.

Dengan penerapan digitalisasi, balai karantina dapat mengelola anggaran dengan lebih akurat dan efisiensi, terutama dalam pengawasan dan operasional karantina. Serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder terhadap tata kelola keuangan yang transparan, dan

mempermudah evaluasi dan audit keuangan, sehingga kinerja instansi dalam menggunakan anggaran dapat lebih terukur.

2.1.4 Siklus Akuntansi Pemerintahan

Siklus Akuntansi Pemerintahan merupakan rangkaian proses yang dilakukan oleh entitas pemerintah dalam mengelola keuangan negara, mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pelaporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

1. Penganggaran: Penyusunan anggaran berdasarkan rencana kerja dan prioritas nasional
2. Pelaksanaan Anggaran: pengeluaran dan penerimaan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui
3. Pelaporan Keuangan: penyusunan laporan keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Implementasi di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulut, sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Petanian, menerapkan akuntansi pemerintah dalam:

1. Pengelolaan Anggaran: Menyusun anggaran tahunan berdasarkan rencana strategis dan kebutuhan operasional.
2. Pelaporan Keuangan: Menyusun laporan keuangan yang mencerminkan penggunaan anggaran secara efisien dan efektif.
3. Pengawasan Internal: Melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan akuntabilitas

2.1.5 Indikator Efisiensi Pengelolaan Anggaran

Efisiensi anggaran dapat diartikan sebagai penggunaan anggaran yang optimal dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas hasil yang dicapai. Dalam konteks pemerintahan, efisiensi anggaran berfokus pada penggunaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tanpa pemborosan dan dengan hasil yang maksimal

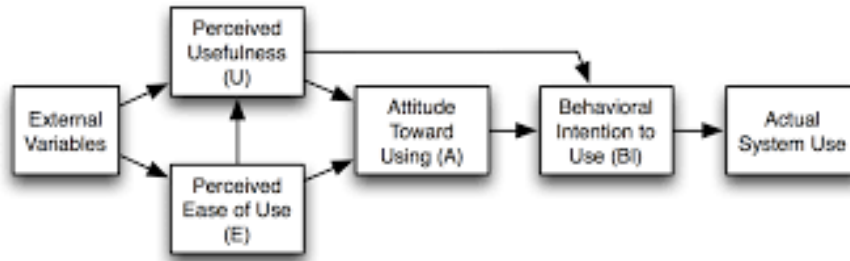
Untuk mengukur efisiensi pengelolaan anggaran dalam konteks penerapan digitalisasi pengendalian belanja, beberapa indikator yang relevan antara lain:

1. Tingkat Ketepatan Penggunaan Anggaran (*Budget Accuracy*)
Mengukur seberapa tepat anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan yang tercatat dalam rencana anggaran tahunan. Digitalisasi dapat meningkatkan akurasi anggaran melalui perencanaan berbasis data yang lebih baik.
2. Tingkat Penyimpangan Anggaran (*Budget Deviation*)
Mengukur selisih antara anggaran yang direncanakan dengan yang terealisasi. Dengan pengendalian berbasis digital, penyimpangan anggaran dapat diminimalkan karena adanya system monitoring yang lebih ketat.
3. Tingkat Penghematan Anggaran (*Cost Savings*)
Mengukur kemampuan untuk menghemat anggaran yang tidak terpakai atau tidak terealisasi dengan tepat waktu . penerapan digitalisasi dapat meningkatkan pengawasan dan control terhadap belanja yang tidak perlu.
4. Indeks Transparansi Anggaran (*Transparency Index*)
Mengukur sejauh mana aliran dana dan penggunaan anggaran dapat dipantau oleh semua pihak terkait. System digitalisasi, seperti e-budgeting dan laporan anggaran berbasis web, dapat meningkatkan transparansi.

2.1.6 Model Penerimaan Teknologi (Technology Acceptance Model-TAM)

Teori Model Penerimaan Teknologi (TAM) dikembangkan oleh Davis (1989) untuk menjelaskan faktor yang memengaruhi adopsi sistem teknologi dalam organisasi. Teori ini menyatakan bahwa keputusan pengguna untuk menerima teknologi tergantung pada dua variabel utama: *perceived usefulness* (kegunaan yang dirasakan) dan *perceived ease of use* (kepraktisan penggunaan). Dalam konteks penelitian ini, TAM relevan untuk menganalisis hambatan adopsi sistem digitalisasi pengendalian belanja di BKHIT Sulut, terutama dalam mengukur sikap aparatur terhadap teknologi baru . Studi Suharto (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi digitalisasi di instansi pemerintah Indonesia dipengaruhi oleh

pemahaman manfaat teknologi dan dukungan organisasional, yang sejalan dengan prinsip TAM.



Pada bagian ini menggambarkan *alur logis* bagaimana seseorang atau suatu organisasi menerima dan menggunakan teknologi baru, dalam hal ini sistem digitalisasi pengendalian belanja.

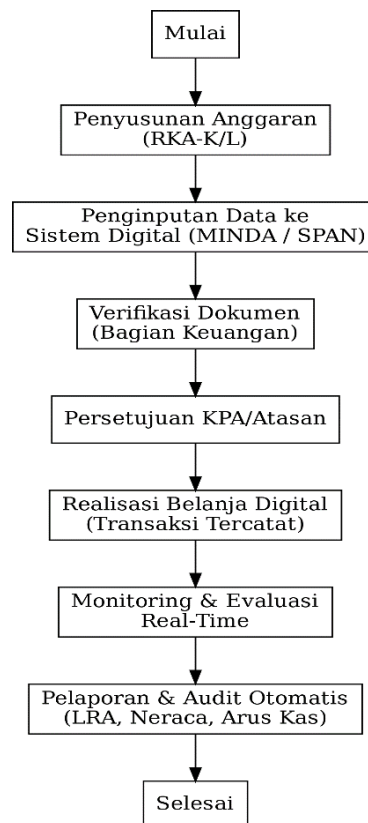
Model ini membantu menjelaskan mengapa sebagian pegawai di BKHIT Sulut menerima sistem digital dengan baik, sedangkan yang lain mengalami hambatan seperti kurang percaya diri menggunakan teknologi atau tidak merasa ada manfaat signifikan dari penggunaannya.

2.1.7 Pengendalian Belanja

Pengendalian belanja, atau pengendalian pengeluaran, adalah proses pengelolaan, pemantauan, dan penyesuaian anggaran serta arus kas suatu organisasi untuk memastikan bahwa pengeluaran tetap sesuai dengan rencana dan tujuan keuangan. Pengendalian ini melibatkan penetapan standar, perbandingan hasil aktual dengan anggaran, dan tindakan koreksi jika terjadi penyimpangan. Dalam konteks jurnal, pengendalian belanja berarti memastikan bahwa pengeluaran yang dicatat dalam jurnal sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Tujuan pengendalian belanja yaitu:

1. Efisiensi: Mengurangi pemborosan dan belanja yang tidak perlu.
2. Efektivitas: Menjamin bahwa anggaran digunakan untuk tujuan yang memberi dampak besar bagi masyarakat.
3. Kepatuhan: Sesuai aturan hukum, anggaran, dan prosedur.
4. Fleksibilitas fiskal: Menjaga defisit dan utang dalam batas aman.
5. Keadilan: Mengarahkan belanja untuk pemerataan pembangunan.

Flowchart prosedur pengendalian belanja



Penjelasannya:

1. Penyusunan Anggaran

Unit kerja menyusun RKA-K/L berdasarkan rencana kegiatan tahunan.

2. Penginputan ke Sistem Digita

Data dimasukkan ke sistem digital seperti MINDA atau SPAN untuk validasi awal.

3. Verifikasi Dokumen Belan

Bagian keuangan memverifikasi dokumen belanja sesuai DIPA.

4. Persetujuan Pengeluar

Persetujuan oleh KPA/atasan dilakukan melalui sistem digital.

5. Realisasi Transaks

Pengeluaran dilaksanakan dan secara otomatis tercatat dalam sistem.

6. Monitoring & Evaluasi

Pemantauan dilakukan secara real-time untuk mencegah pemborosan.

7. Pelaporan & Audit Otomati

Sistem menghasilkan laporan keuangan dan jejak audit secara otomatis.

Jenis-jenis dan komponen belanja Pemerintah, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan pedoman RKA-K/L, belanja pemerintah pusat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis dan komponen utama:

1) Belanja pegawai

- a) Gaji pokok PNS dan PPPK
- b) Tunjangan (keluarga, jabatan, fungsional dan lainnya)
- c) Uang makan dan uang lembur
- d) Honorarium dan belanja pegawai tidak tetap

2) Belanja Barang

- a) Belanja operasional perkantoran (konsumsi, alat tulis, ATK)
- b) Belanja jasa seperti langganan internet, air, listrik, telepon
- c) Belanja bahan bakar, pemeliharaan gedung dan peralatan
- d) Belanja perjalanan dinas dan jasa profesi

3) Belanja Modal

- a) Belanja untuk pengadaan aset tetap: tanah, gedung, peralatan, mesin
- b) Renovasi atau pembangunan infrastruktur
- c) Sistem dan perangkat teknologi

2.1.8 Teori Transformasi Digital dalam Sektor Publik

Transformasi digital di sektor publik ditinjau melalui *perspektif social participation* dan *institutional adaptation*, seperti yang dijelaskan oleh dalam web_search. Teori ini menekankan bahwa digitalisasi tidak hanya teknis, tetapi juga melibatkan adaptasi budaya organisasi dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks BKHIT Sulut, transformasi digital harus disertai pelatihan aparatur dan kolaborasi dengan pihak terkait untuk memastikan efektivitas sistem. Studi Prasetyo (2021) menunjukkan bahwa

keberhasilan transformasi digital di instansi pemerintah Indonesia bergantung pada integrasi teknologi dengan regulasi lokal dan kebutuhan operasional.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa digitalisasi memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran di sektor publik.

Penelitian Prasetyo (2021) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengendalian internal mampu meningkatkan efisiensi anggaran hingga 30%, melalui pemantauan secara real-time dan pengurangan kesalahan administrasi. Penelitian ini mendukung bahwa digitalisasi merupakan faktor penting dalam penguatan kontrol belanja.

Sementara itu, Djoni (2022) meneliti penerapan sistem berbasis *cloud computing* dan menyimpulkan bahwa transparansi laporan keuangan publik meningkat hingga 45% berkat kemudahan akses dan audit trail otomatis. Ini relevan dengan anggapan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan akuntabilitas dan pelaporan keuangan yang lebih terbuka.

Laporan dari Badan Pengawas Keuangan (2020) menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian internal yang baik, termasuk pemanfaatan teknologi, mampu menurunkan risiko keuangan hingga 20%. Hal ini menguatkan pentingnya sistem kontrol yang modern untuk menjaga efisiensi dan keakuratan dalam pengelolaan anggaran.

Selanjutnya, studi oleh Zein, Anggraini, dan Malau (2025) terhadap beberapa instansi pemerintah daerah menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki dampak positif terhadap efisiensi pelayanan, akurasi pengelolaan anggaran, serta mempercepat proses administrasi. Faktor kunci keberhasilannya terletak pada integrasi sistem dan kapasitas SDM yang kompeten.

Secara keseluruhan, seluruh penelitian tersebut memperkuat bahwa penerapan digitalisasi pada pengendalian belanja merupakan pendekatan

strategis yang efektif untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

2.3 Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka berpikir penelitian dirancang berdasarkan konsep Sugiyono (2013) , yang menggambarkan hubungan antara variabel independen, dependen, dan penengah. Struktur ini meliputi:

1. Variabel Independen : Digitalisasi Pengendalian Belanja (termasuk sistem TI, integrasi data, dan pemantauan real-time).
2. Variabel Dependen : Pelaksanaan Anggaran (efisiensi, transparansi, dan keakuratan laporan).

2.4 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka berpikir, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. H₀ : Penerapan digitalisasi pengendalian belanja tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pelaksanaan anggaran pada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara (BKHIT Sulut).(Dukungan: Ghozali, I. (2018).
2. H₁ : Penerapan digitalisasi pengendalian belanja berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pelaksanaan anggaran di BKHIT Sulut. (Dukungan: Studi Prasetyo (2021)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif deskriptif analitis, yang bertujuan menganalisis hubungan antara penerapan digitalisasi pengendalian belanja dengan pelaksanaan anggaran di BKHIT Sulut. Jenis penelitian ini dipilih karena fokus pada pengukuran kuantitatif variabel independen (digitalisasi), variabel penengah (pengendalian internal), dan variabel dependen (efisiensi/transparansi anggaran)

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara, dengan fokus lokasi pada kantor Unit Pelaksana Teknis yang beralamat di Jalan AA. Maramis No. 283, Mapanget, Manado.
2. Penyusunan proposal : 1 Maret – 20 Maret 2025
3. Pengumpulan data : 1 April – 30 April 2025
4. Analisis data dan penulisan laporan : Maret – April 2025

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian : adalah seluruh pegawai Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara yang terlibat langsung dalam aktivitas pengendalian belanja dan pengelolaan anggaran, dengan total sekitar 35 orang.

Sampel penelitian : digunakan adalah teknik jenuh (census), karena jumlah populasi yang terbatas, sehingga seluruh pegawai tersebut dijadikan responden untuk memastikan validitas data yang diperoleh.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner : Instrumen ini dimanfaatkan untuk menilai persepsi responden mengenai pelaksanaan digitalisasi dan sistem pengendalian internal. Dan dibagikan kepada para pegawai di bagian keuangan dan perencanaan serta

pegawai lainnya.

2. Observasi : Diterapkan untuk menilai proses pengelolaan anggaran di lapangan (dilakukan pada bagian keuangan dan perencanaan di BKHITSulawesi Utara, khususnya untuk mengamati proses digitalisasi pengendalian belanja, mulai dari input data anggaran, verifikasi transaksi, hingga pelaporan melalui aplikasi yang ada)
3. Studi Dokumen : Analisis laporan keuangan, SOP, dan data transaksi belanja periode 2020–2024. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan data kuantitatif.
4. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner daring (via Google Form) dan dokumen keuangan resmi, sebagaimana praktik dalam penelitian berbasis data institusi

3.5 Alat Pengukur Data

1. Kuesioner : Berbentuk skala Likert 1–5 untuk mengukur indikator digitalisasi (misal: ketersediaan sistem online, kepraktisan penggunaan), efisiensi, dan transparansi.
2. Data sekunder : Data anggaran sebelum dan sesudah efisiensi, yang mencerminkan dan menunjukkan alokasi, realisasi belanja serta menunjukkan perubahan alokasi belanja berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) tahun anggaran sebelumnya dan pasca penerapan kebijakan penghematan.

3.5.1 Variabel penelitian

Dalam studi yang berjudul “Pengaruh Pengendalian Belanja terhadap Efisiensi Pengelolaan Anggaran pada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan”, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner, yang dirancang untuk menilai dua variabel utama berikut:

1. Variabel independen (X): Penerapan Digitalisasi Pengendalian Belanja
2. Variabel dependen (Y): Efisiensi Pengelolaan Anggaran

1) Variabel independen atau variabel bebas (X)

Variabel ini sering disebut variabel *Stimulus*, *Prediktor*, *Atecedent*.

Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel ini diukur berdasarkan beberapa indikator berikut:

- 1) Perencanaan Belanja
- 2) Pelaksanaan Belanja

2) Variabel Dependen atau Variabel terikat (Y)

Variabel ini sering dikenal sebagai variabel output, variabel kriteria, atau variabel konsekuen. Dalam bahasa Indonesia, istilah yang umum digunakan adalah variabel terikat.

Setiap pertanyaan dalam kuesioner diukur menggunakan skala liter 5 poin yaitu:

Skor	Keterangan
1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju
3	Netral
4	Setuju
5	Sangat Setuju

3.5.2 Alat Uji Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan SPSS sebagai alat bantu untuk mengolah data dari kuesioner dan melakukan pengujian hipotesis. SPSS digunakan untuk melakukan analisis statistik dan menyajikan laporan hasil penelitian. Jenis analisis yang dapat dilakukan mencakup analisis sederhana, seperti penghitungan mean dan standar deviasi, hingga analisis lanjutan seperti regresi dan multivariat.

Beberapa alat uji yang digunakan antara lain:

1. Pengujian Data Secara Deskriptif

Digunakan untuk menggambarkan karakteristik data responden seperti rata-rata (mean), standar deviasi, minimum, dan maksimum dari setiap item dalam kusioner. Tujuannya adalah untuk melihat persepsi umum responden terhadap variabel yang diteliti (X dan Y)

2. Uji Validitas

Uji validitas berfungsi untuk mengidentifikasi apakah alat ukur dalam penelitian mampu merepresentasikan data sesuai dengan aspek yang ingin dianalisis. Dalam penelitian ini, digunakan validitas konstruk (*construct validity*) yang dianalisis menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS.

Suatu data dianggap valid jika nilai r hitung melebihi r tabel (dengan tingkat signifikansi 5% dan jumlah responden tertentu), atau jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Setiap indikator dalam kusioner, baik pada variabel pengendalian belanja maupun efisiensi pengelolaan anggaran, diuji secara individual.

3. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsisten alat ukur dalam mengukur suatu konstruk. Dalam penelitian ini, digunakan metode *Cronbach's Alpha* dengan bantuan program SPSS

Suatu variabel akan dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,6$. Jika nilai lebih kecil dari 0,6 maka data dianggap kurang reliabel dan perlu diperbaiki.

4. Uji Regresi Sederhana

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Penelitian ini menggunakan metode regresi guna mengetahui sejauh mana Penerapan Digitalisasi Pengendalian Belanja (X) berperan dalam meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Anggaran (Y) pada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana, karena analisisnya hanya difokuskan pada satu variabel independen (X) dan satu variabel dependen (Y)).

- 1) Hasil analisis regresi akan menunjukkan apakah variabel X memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y, yang dibuktikan dengan melihat nilai signifikan (Sig) > 0,05
- 2) Ketika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara digitalisasi pengendalian belanja dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

Rumus: $Y=a+bX+e$

Keterangan:

Y: variabel dependen (yang diprediksi)

X: variabel independen (yang mempengaruhi Y)

a: intercept (nilai Y saat X = 0)

b: koefisien regresi (kemiringan garis)

e: error (kesalahan residual)

5. Uji F (Simultan)

Tujuan dari Uji F adalah untuk menguji apakah seluruh variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Uji ini juga berguna dalam mengevaluasi apakah model regresi yang digunakan sudah tepat secara menyeluruh.

Hipotesis:

- 1) H_0 : Variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (model tidak signifikan)
- 2) H_1 : Variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (model signifikan)

Kriteria Penguji:

- 3) Jika nilai signifikansi (Sig.) kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak, yang berarti model regresi secara simultan signifikan.
- 4) Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka H_0 diterima, yang menunjukkan bahwa model tidak signifikan.

6. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel Pengendalian Belanja berpengaruh secara signifikan terhadap Efisiensi Pengelolaan Anggaran.

7. Uji Koefisien Determinasi (R Square)

R Square (R^2) yang dikenal sebagai koefisien determinasi, mengukur sejauh mana variabel bebas (X) mampu menjelaskan variabel terikat (Y) dalam model regresi. Nilai ini berkisaran antara 0 sampai 1.

- 1) $R^2 = 0$ menunjukkan bahwa variabel independen sama sekali tidak mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen.
- 2) $R^2 = 1$ menunjukkan bahwa seluruh variasi dalam variabel dependen sepenuhnya dapat dijelaskan oleh variabel independen.

3.6 Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif : Menggambarkan data melalui ukuran rata-rata dan penyebaran (standar deviasi) guna melihat kecenderungan dalam pelaksanaan anggaran.
2. Analisis Regresi Berganda : Digunakan untuk menguji pengaruh digitalisasi terhadap variabel dependen (efisiensi/transparansi) dan untuk memahami peran pengendalian internal sebagai variabel intervening..

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Deskripsi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara (Karantina Sulut) merupakan unit pelaksanaan teknis di bawah Badan Karantina Indonesia (Barantin) yang bertugas menjaga keamanan hayati dan mencegah masuk serta tersebarnya hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan di wilayah Sulawesi Utara

Sejarah Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan berawal sejak masa kolonial Belanda, ketika sistem mulai diberlakukan untuk mengamankan perdagangan komoditas pertanian dan peternakan dari ancaman penyakit dan hama. Setelah kemerdekaan Indonesia, balai ini mengalami perkembangan signifikan seiring dengan kebutuhan pengawasan yang semakin kompleks akibat meningkatnya aktivitas ekspor impor dan perdagangan Indonesia.

Karantina Sulut beroperasi berdasarkan kerangka hukum nasional, pada mulanya dasar hukum karantina hewan, ikan, dan tumbuhan merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992. Namun, dengan adanya dinamika zaman dan kebutuhan penguatan hukum, aturan tersebut telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 yang lebih lengkap dalam mengatur sistem karantina di Indonesia. Sebagai bagian dari jaringan nasional Barantin, Karantina Sulut memiliki peran strategis dalam pengawasan lalu lintas komoditas pertanian dan perikanan, terutama di wilayah perbatasan dan pelabuhan utama seperti pelabuhan Bitung dan Pelabuhan Tahuna. Karantina Sulut aktif dalam berbagai kegiatan termasuk:

1. Fasilitas Ekspor: Mendukung ekspor produk unggulan Sulawesi Utara seperti bunga pala, produk turunan kelapa, dan ikan kaleng dengan nilai ekonomi signifikan.

2. Pengawasan ketat: Melakukan pemeriksaan terhadap komoditas yang masuk dan keluar melalui pelabuhan untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit.
3. Sosialisasi dan Edukasi: Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha sosialisasi peraturan karantina dan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur karantina.
4. Operasi Patuh: Menggelar operasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan karantina dan mencegah penyeludupan komoditas ilegal.

Secara resmi, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan di Sulawesi Utara didirikan untuk memperkuat sistem pengawasan di wilayah tersebut, mengingat Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah strategis dengan aktivitas perdagangan dan pelabuhan yang padat. Sejak pembentukannya, BKHIT Sulut terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan karantina melalui penerapan teknologi modern, pelatihan SDM, dan pengembangan regulasi yang sesuai dengan standar internasional.

Peran BKHIT Sulut menjadi semakin krusial terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi perdagangan yang menuntut ketatnya pengawasan untuk menjaga kualitas dan keamanan produk hewan, ikan dan tumbuhan yang beredar di pasar domestik maupun internasional.

4.1.2 Visi dan Misi balai karantina hewan, ikan dan tumbuhan

1. Visi

Menjadi institusi karantina yang profesional, terpercaya, dan berstandar internasional dalam melindungi kesehatan hewan, ikan dan tumbuhan serta mendukung keamanan pangan dan kelestarian lingkungan.

2. Misi

- 1) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian karantina terhadap lalu lintas hewan, ikan dan tumbuhan secara efektif dan efisien.
- 2) Meningkatkan kualitas layanan karantina dengan penerapan teknologi modern dan sumber daya manusia yang kompeten.

- 3) Mendorong kepatuhan terhadap peraturan dan standar karantina nasional maupun internasional.
- 4) Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas karantina.
- 5) Melakukan pengawasan yang ketat guna mencegah masuk dan keluarnya hama, penyakit, serta organisme pengganggu yang berpotensi merugikan.
- 6) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya karantina hewan, ikan dan tumbuhan dalam menjaga kesehatan dan keamanan pangan.

4.1.3 Logo Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Gambar 4. 1 Logo Balai Karantina



Logo Badan Karantina Indonesia menggambarkan sistem perlindungan yang komprehensif, menyatu, dan kokoh terhadap berbagai potensi ancaman, Termasuk di dalamnya adalah penyebaran hama serta penyakit yang menyerang hewan, ikan, dan tumbuhan. Logo tersebut juga merepresentasikan fungsi pengawasan terhadap keamanan pangan serta pengendalian kualitas pangan dan pakan. Setiap elemen yang tergambar bersinergi dalam satu kesatuan yang kuat, baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun integritas, serta menunjukkan ketegasan dalam bersikap dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Logo ini mencerminkan tekad yang bulat untuk menjaga sumber daya hayati serta mempersiapkan masa depan demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

a. Lingkaran berwarna kuning keemasan

Lingkaran melambang ke-KUAT-an proteksi, keutuhan tekad yang sempurna dalam melindungi sumber daya alam hayati indonesia. Adanya dua lingkaran, juga menggambarkan ke-KUAT-an yang berlapis dalam upaya perlindungan tersebut. Sedangkan warna lingkaran kuning keemasan, mencerminkan ke-KUAT-an dan kehati-hatian dalam bertindak

b. Garuda Pancasila

Lambang negara yang posisinya berada di tengah-tengah melambangkan bahwa Badan Karantina Indonesia selalu membawa nama baik bangsa dalam setiap keputusannya, oleh karena itu perlu kehati-hatian dan keseriusan dalam bertindak.

c. Lingkaran berwarna coklat

Menggambarkan tanah air indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Tanah juga diartikan sebagai awal mula kehidupan, murni, hal ini sejalan dengan tugas Badan Karantina Indonesia yang menjaga plasma nutfah baik hewan, ikan maupun tumbuhan dari ancaman masuk dan tersebarnya hama dan penyakit.

d. Lingkaran berwarna kehijauan

Bermakna keanekaragaman hayati yang dimiliki indonesia, juga berarti ketulusan dari setiap insan karantina dalam menjalankan tugas, tidak memiliki niat dan motivasi lain, namun murni hanya untuk melindungi negara dari ancaman masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan baik antarr era maupun dari dan ke dalam wilayah NKRI

e. Bintang 8 sudut

Melambangkan delapan langkah karantina, termasuk tindakan pemeriksaan sebagai bagian utamanya, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan pada tempat pemasukan dan pengeluaran. Juga bermakna cahaya

dari Tuhan Yang yang Maha Esa. Sehingga dalam setiap sikap, tindakan dan tutur katanya selain beralaskan moral, adab dan budaya, juga berdasarkan makna-makna ketuhanan.

f. **Tex badan karantina indonesia**

Istilah ini digunakan untuk menggambarkan lembaga yang bertugas melaksanakan peran kenegaraan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 mengenai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

4.1.4 Profit BKHIT Sulawesi Utara

BKHIT Sulut atau Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah koordinasi Badan Karantina Indonesia. Balai ini memiliki peran penting dalam melakukan tindakan karantina terhadap berbagai komoditas hewan, ikan, tumbuhan, dan produk olahannya yang keluar dan masuk wilayah. Langkah ini bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran hama dan penyakit yang berpotensi merugikan sektor pertanian, peternakan, serta perikanan, serta melestarikan sumber daya hayati.

Dalam menjalankan tugasnya, BKHIT Sulut melaksanakan berbagai kegiatan seperti pemeriksaan fisik dan dokumen, pengamatan, perlakuan karantina, hingga penahanan, penolakan, atau pemusnahan terhadap komoditas yang tidak memenuhi persyaratan karantina. Selain itu, BKHIT Sulut juga menerbitkan sertifikasi kesehatan karantina dan menyediakan layanan informasi kepada masyarakat serta pelaku usaha.

BKHIT Sulawesi Utara dipimpin oleh Drh. I Wayan Kartenegro, M.Pt., dan didukung oleh sejumlah bidang teknis seperti Karantina Hewan, Karantina Ikan, Karantina Tumbuhan, serta bagian administrasi dan pengawasan internal. Struktur ini memungkinkan pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien di berbagai pintu pengawasan, seperti pelabuhan laut, bandara, dan pos lintas batas.

Peran BKHIT Sulut sangat strategis dalam mendukung kelancaran perdagangan domestik maupun internasional, khususnya dalam menjamin

keamanan dan mutu komoditas ekspor daerah. Lembaga ini juga aktif menjalin kerja sama dengan berbagai instansi seperti Bea Cukai, TNI AU, dan pemerintah daerah dalam berbagai kegiatan pengawasan, sosialisasi, dan edukasi publik. Melalui pengawasan ketat dan pelayanan yang profesional, BKHIT Sulut berkomitmen untuk menjaga keamanan hayati dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

4.1.5 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Balai karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara. struktur organisasi di BKHIT Sulut terdiri atas beberapa elemen penting. Di posisi paling atas terdapat Kepala Balai, yang turut menjalankan fungsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Beliau bertanggung jawab atas keseluruhan operasional balai, termasuk dalam hal pengambilan keputusan anggaran. Di bawahnya, terdapat Subbagian Tata Usaha yang menangani aspek administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan. Subbagian ini menjadi bagian sentral dalam proses pengelolaan keuangan harian instansi, serta pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan anggaran.

Selain Subbagian Tata Usaha, terdapat pula tiga kelompok teknis yang menjalankan fungsi inti karantina, yaitu Karantina Hewan, Karantina Ikan, dan Karantina Tumbuhan. Ketiga kelompok ini berperan dalam pelaksanaan operasional pengawasan di berbagai titik masuk dan keluar wilayah, seperti pelabuhan dan bandara. Masing-masing kelompok bekerja sesuai dengan keahlian dan bidangnya dalam menjamin keamanan hayati dan kesehatan komoditas pertanian

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi



4.2 Hasil Penelitian

Penelitian ini untuk mengevaluasi hubungan antara, Digitalisasi Pengendalian Belanja (X) terhadap Efisiensi Pengelolaan Anggaran (Y) dari responden yang memiliki masa kerja yang berbeda. Total responden sebanyak 36 orang dengan masa kerja bervariasi mulai dari 1-2 tahun hingga lebih dari 5 tahun.

Jawaban atas pengumpulan data dengan menggunakan kusioner, selanjutnya dilakukan tabulasi secara lebih terperinci sebagai langkah untuk menjabarkan hasil jawaban yang telah responden pilih

Sebagai implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan anggaran dan digitalisasi sistem keuangan negara, BKHIT Sulawesi Utara telah menerapkan sistem digital pengendalian belanja yang terintegrasi dalam RKA-K/L (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga) dan pelaporannya melalui LRA (Laporan Realisasi Anggaran).

Beriku contoh tampilan format dari RKA-K/L

Gambar 4. 3 Format RKA-K/L

KEMENLEMB		(122)	RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025				Mekaya		3
UNIT ORG		(01)	BUDJAN KASANTINA INDONESIA						
UNIT KERJA		(030000)	Badan Karantina Indonesia						
ALOKASI		Rp. 17.624.244,000	BALAI KARANTINA HEWAN, MAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA						

Tabel 4. 1 Anggaran Sebelum dan Sesudah Efisiensi

No	Nama Kegiatan	Anggaran RKAKL	Nilai Efisiensi Menurut INPRES 1/2024 (di olah dalam MINDA)	Presentase Efisiensi Inpres 1/2024	Hasil Efisiensi BKHIT Solut (Rekomendasi AI)
1	Belanja Bahan	Rp322.445.002	Rp306.975.000	95%	Rp15.470.002
2	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp350.065.000	Rp314.065.000	90%	Rp36.000.000
3	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp4.289.584.000	Rp-	0%	Rp4.289.584.000
4	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp271.242.000	Rp-	0%	Rp271.242.000
5	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	Rp145.296.000	Rp4.176.000	3%	Rp141.120.000
6	Belanja Jasa Lainnya	Rp145.650.000	Rp145.650.000	100%	Rp-
7	Belanja Jasa Profesi	Rp26.300.000	Rp24.700.000	94%	Rp1.600.000
8	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp2.880.164.944	Rp1.090.054.000	38%	Rp1.790.110.944
9	Belanja Langganan Air	Rp30.000.000	Rp-	0%	Rp30.000.000
10	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	Rp686.317.000	Rp232.998.000	34%	Rp453.319.000
11	Belanja Langganan Listrik	Rp479.999.996	Rp50.000.000	10%	Rp429.999.996
12	Belanja Langganan Telepon	Rp125.999.996	Rp50.000.000	40%	Rp75.999.996
13	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp45.000	Rp-	0%	Rp45.000
14	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp32.000	Rp-	0%	Rp32.000
15	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp197.837.000	Rp197.837.000	100%	Rp-
16	Belanja Pemeliharaan Jaringan	Rp149.532.000	Rp89.532.000	60%	Rp60.000.000
17	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp1.054.413.993	Rp676.472.000	64%	Rp377.941.993
18	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp610.912.200	Rp69.501.000	11%	Rp541.411.200

19	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp25.000.000	Rp13.750.000	55%	Rp11.250.000
20	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp2.581.795.000	Rp.1.113.245.000	43%	Rp1.468.550.000
21	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp40.650.000	Rp34.050.000	84%	Rp6.600.000
22	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	Rp279.140.000	Rp174.120.000	62%	Rp105.020.000
23	Belanja Sewa	Rp1.072.174.800	Rp709.455.000	66%	Rp362.719.800
24	Belanja Tunj. Anak PNS	Rp54.196.000	Rp-	0%	Rp54.196.000
25	Belanja Tunj. Beras PNS	Rp108.339.000	Rp-	0%	Rp108.339.000
26	Belanja Tunj. Fungsional PNS	Rp372.072.000	Rp-	0%	Rp372.072.000
27	Belanja Tunj. PPh PNS	Rp27.962.000	Rp-	0%	Rp27.962.000
28	Belanja Tunj. Struktural PNS	Rp45.500.000	Rp-	0%	Rp45.500.000
29	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	Rp168.382.000	Rp-	0%	Rp168.382.000
30	Belanja Tunjangan Anak PPPK	Rp9.048.000	Rp-	0%	Rp9.048.000
31	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp19.119.000	Rp-	0%	Rp19.119.000
32	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Rp26.710.000	Rp-	0%	Rp26.710.000
33	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	Rp27.128.000	Rp-	0%	Rp27.128.000
34	Belanja Tunjangan Umum PNS	Rp49.810.000	Rp-	0%	Rp49.810.000
35	Belanja Uang Lembur	Rp1.017.479.000	Rp-	0%	Rp1.017.479.000
36	Belanja Uang Lembur PPPK	Rp30.070.000	Rp-	0%	Rp30.070.000
37	Belanja Uang Makan PNS	Rp529.846.000	Rp-	0%	Rp529.846.000
38	Belanja Uang Makan PPPK	Rp52.965.000	Rp-	0%	Rp52.965.000
Total		Rp18.303.221.931	Rp5.296.580.000	73,3%	73,3%

Sumber: Data Internal BKHIT Sulut, 2025 (diolah)

Berdasarkan data efisiensi anggaran di BKHIT Sulut, dari total anggaran yang ada pada RKA-K/L sebesar Rp. 18.303.221.931, sistem

berbasis kecerdasan buatan melalui platfom MINDA telah menghasilkan rekomendasi efisiensi sebesar Rp. 5.296.580.00 atau setara dengan 73,3% dari keseluruhan belanja yang dianalisis.

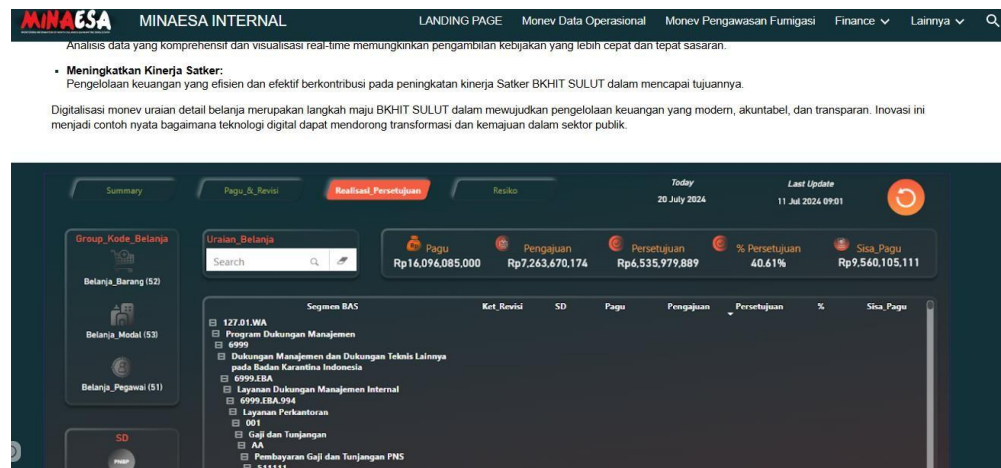
MINDA atau Manajemen Informasi Dana Anggaran adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mendukung pemantauan pelaksanaan anggaran secara real-time di lingkungan Kementerian/Lembaga, termasuk Satker UPT.

Aplikasi ini digunakan untuk:

1. Mengelola proses pencairan anggaran
2. Memonitor realisasi belanja
3. Mengontrol deviasi antara rencana dan realisasi anggaran
4. Menyusun laporan keuangan secara elektronik dan otomatis

BKHIT Sulut sebagai Satker aktif menggunakan aplikasi MINDA untuk menginput data belanja, memverifikasi kegiatan berbasis DIPA, dan mengawasi efisiensi pelaksanaan anggaran secara transparan.

Gambar 4. 4 Display MINDA



Sumber: MINDA 2025

Manajemen Informasi Dana Anggaran (MINDA) yang digunakan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga, termasuk UPT seperti Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT). Aplikasi ini dirancang untuk menyediakan informasi secara *real-time* mengenai status pelaksanaan anggaran, termasuk pencairan dana, realisasi belanja, dan deviasi antara rencana dan realisasi.

Tampilan (display) dari aplikasi MINDA umumnya mencakup:

1. Dashboard realisasi anggaran per kegiatan
2. Grafik perbandingan anggaran dan realisasi
3. Status validasi dokumen pengeluaran
4. Rekapitulasi bulanan atau triwulan pelaksanaan anggaranPeringatan dini (early warning system) bila terjadi potensi deviasi

Dengan display ini, pengguna di tingkat operasional seperti pejabat perencana, bendahara pengeluaran, hingga KPA dapat mengambil keputusan keuangan dengan cepat dan akurat. Di BKHIT Sulut, penggunaan MINDA mempercepat proses pengawasan internal dan pelaporan kepada pusat, sekaligus mendukung efisiensi dan transparansi dalam tata kelola keuangan.

4.2.1 Deskripsi Responden

Responden pada penelitian ini adalah staff bagian keuangan dan para staff lainnya yang bekerja di BKHIT Sulut. Hasil pengumpulan data dalam bentuk kusioner yang berjumlah 36 dan dapat di analisis lebih lanjut Pengambilan data yang bersumber pada hasil akumulasi data kusioner secara rinci memiliki karakteristik yaitu:

Tabel 4. 2 Komposisi Responden Berdasarkan Masa Kerja

No	Karakteristik	keterangan	Jumlah
1	Masa Kerja	Kurang dari 1 tahun	1 orang
		3-5 tahun	8 orang
		Lebih dari 5 tahun	27 orang

Sumber: Kusioner 2025

Mayoritas reponden memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 tahun (75%), yang mencerminkan pemahaman mendalam terkait sistem pengelolaan anggaran dan digitalisasi pengendalian belanja

4.2.2 Deskripsi Variabel

A. Hasil Uji Validitas

Dalam melakukan penelitian ini, terlebih dahulu melakukan uji validiitas dan reabilitas terhadap responden untuk melihat hasil valid dan

reliabel instrumen penelitian yang digunakan dalam hal ini kusioner penelitian. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kusioner. Setelah instrumen atau kusioner disusun, dilakukan uji coba terhadap sampel yang berasal dari populasi yang diteliti. Dalam uji coba ini, terdapat 36 responden yang dilibatkan

Tabel 4. 3 Hasil Uji Validitas
Instrumen Variabel Digitalisasi Pengendalian Belanja

Item	r hitung	Sig. (2-tailed)	Alpha	Keterangan
P01	0,860	0,000	0,05	Valid
P02	0,784	0,000	0,05	Valid
P03	0,899	0,000	0,05	Valid
P04	0,755	0,000	0,05	Valid
P05	0,865	0,000	0,05	Valid
P06	0,823	0,000	0,05	Valid
P07	0,923	0,000	0,05	Valid
P08	0,717	0,000	0,05	Valid
P09	0,851	0,000	0,05	Valid
P10	0,764	0,000	0,05	Valid

Item	r hitung	Sig. (2-tailed)	Alpha	Keterangan
P01	0,801	0,000	0,05	Valid
P02	0,856	0,000	0,05	Valid
P03	0,859	0,000	0,05	Valid
P04	0,915	0,000	0,05	Valid
P05	0,895	0,000	0,05	Valid
P06	0,817	0,000	0,05	Valid
P07	0,896	0,000	0,05	Valid
P08	0,657	0,000	0,05	Valid
P09	0,761	0,000	0,05	Valid
P10	0,730	0,000	0,05	Valid

Sumber : SPSS 26, 2025

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap pernyataan valid, karena nilai signifikansi (sig) berada di bawah batas alpha 0,05 dan seluruh nilai koefisien korelasi Pearson lebih besar dari nilai r tabel yang ditentukan.

B. Hasil Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indikator yang menggambarkan seberapa dapat dipercaya dan konsistennya suatu alat ukur. Apabila alat tersebut digunakan berulang kali untuk mengukur fenomena yang sama dan memberikan hasil yang relatif konsisten, maka alat ukur tersebut dianggap reliabel. Dalam penelitian ini, tingkat reliabilitas diukur melalui nilai *Cronbach's Alpha*.

Tabel 4. 4 Tingkat Reliabilitas Cronch's Alph

Alpha	Tingkat Reliabilitas
0,00 s/d 0,20	Kurang Reliabel
> 0,20 s/d 0,40	Agak Reliabel
> 0,40 s/d 0,60	Cukup Reliabel
> 0,60 s/d 0,80	Reliabel
> 0,80 s/d 1,00	Sangat Reliabel

Sumber : SPSS 26, 2025

Untuk menentukan apakah suatu variabel dapat diterima atau tidak, digunakan acuan nilai *Cronbach's Alpha*. Nilai di bawah 0,6 menunjukkan tingkat reliabilitas yang kurang memadai, sedangkan nilai di atas 0,6 menunjukkan bahwa item pertanyaan reliabel. Sementara itu, nilai lebih dari 0,8 menunjukkan bahwa reliabilitasnya tergolong baik. Berikut adalah hasil yang diperoleh:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Jumlah Item	Keterangan
X	0,938	10	Sangat Reliabel
Y	0,945	10	Sangat Reliabel

Sumber : SPSS 26, 2025

Analisis data dengan bantuan SPSS mengindikasikan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang sangat baik, yang tercermin dari nilai Cronbach's Alpha sebagai berikut:

1. Variabel X: 0,938 (Sangat Reliabel)
2. Variabel Y: 0,945 (Sangat Reliabel)

Karena kedua nilai $> 0,8$ maka seluruh item dalam kuesioner dinyatakan sangat reliabel, artinya responden memberikan jawaban yang konsisten.

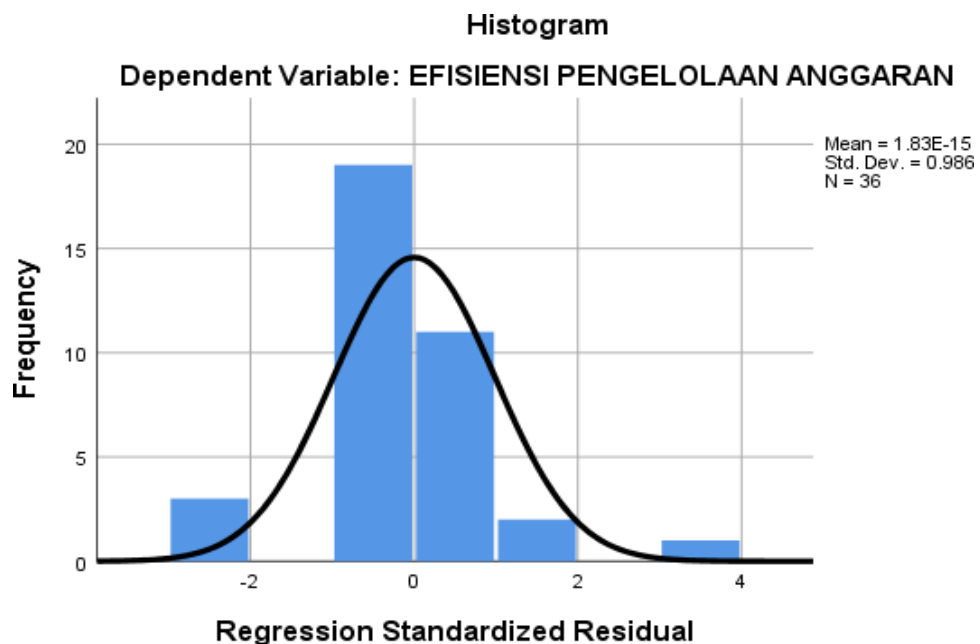
C. Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan bantuan program *SPSS version 26* dan hasil uji asumsi klasik adalah sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengecek apakah distribusi data pada variabel independen dan dependen dalam model regresi bersifat normal. Proses ini umumnya dilakukan melalui tampilan grafik seperti histogram dan P-Plot.

Gambar 4. 5 Histogram

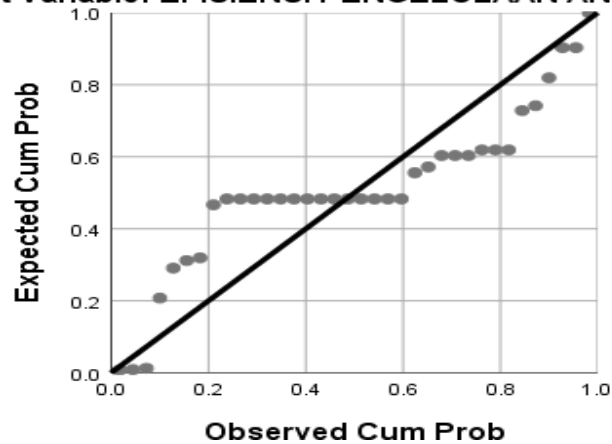


Sumber : SPSS 26, 2025

Kurva pada histogram menunjukkan bahwa model berdistribusi normal, ditandai dengan bentuk kurva menyerupai lonceng. Penilaian terhadap distribusi normal tidak hanya dilakukan dengan histogram, tetapi juga melalui grafik Normal P-Plot Regresi Standardized, yang memperlihatkan apakah pola data mengikuti distribusi normal. Hasilnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4. 6 Normal P-P Plot Of Regression Standardizes Residual

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: EFISIENSI PENGELOLAAN ANGGARAN



Sumber : SPSS 26, 2025

Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

memperlihatkan bahwa titik-titik data tersebar mengikuti pola di sekitar garis diagonal. Pola penyebaran ini menunjukkan bahwa data bergerak searah dengan garis tersebut. Dengan demikian, kedekatan titik-titik terhadap garis lurus menandakan bahwa model memiliki distribusi yang bersifat normal.

D. Hasil Uji Regresi Sederhana

Regresi sederhana merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya pengaruh antara satu variabel bebas (X) terhadap satu variabel terikat (Y). Dalam konteks penulisan skripsi, analisis ini penting untuk menguji apakah hipotesis yang dirumuskan dapat dibuktikan secara statistik.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Regresi Sederhana

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.380	5.032		1.069	.292
DIGITALISASI PENGENDALIAN BELANJA	.895	.106	.823	8.452	.000

a. Dependent Variable: EFISIENSI PENGELOLAAN ANGGARAN

Sumber : SPSS 26, 2025

$$Y = 5,380 (a) + ,895 (X) + e$$

Dari output SPSS yang ditampilkan sebelumnya, persamaan regresi yang terbentuk dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Angka 0,895 adalah koefisien regresi, yang berarti setiap peningkatan 1 poin dalam digitalisasi pengendalian belanja akan meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran sebesar 0,895
- Angka 5,380 adalah konstanta, yang menunjukkan nilai efisiensi anggaran jika tidak ada digitalisasi sama sekali.

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat dan bersifat positif antara penerapan digitalisasi dengan efektivitas pengelolaan anggaran di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara.

2. UJI F

Tabel 4. 7 Hasil Uji F

ANOVA^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	478.840	1	478.840	71.434	.000 ^b
Residual	227.910	34	6.703		
Total	706.750	35			
a. Dependent Variable: EFISIENSI PENGELOLAAN ANGGARAN					
b. Predictors: (Constant), DIGITALISASI PENGENDALIAN BELANJA					

Sumber : SPSS 26, 2025

Dari hasil uji F pada tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 71,434 dan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berada jauh di bawah ambang batas 0,05. Ini menunjukkan bahwa model regresi layak secara keseluruhan, dan digitalisasi pengendalian belanja secara kolektif dengan konstanta berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Dengan demikian, penerapan sistem digital pada proses pengendalian belanja di balai karantina secara umum terbukti berkontribusi dalam memperbaiki efisiensi anggaran, yang sejalan dengan

tujuan utama digitalisasi untuk meminimalisir pemborosan dan meningkatkan akurasi pengelolaan keuangan.

E. Uji Hipotesis (uji t)

Tabel 4. 8 Hasil Uji Hipotesis

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5,380	5,032		1,069	,292
Digitalisasi Pengendalian Belanja	,895	,106	,823	8,452	,000

Sumber : SPSS 26, 2025

a. Dependent Variable: Efisiensi Pengelolaan Anggaran

1. Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$
2. Nilai t-hitung $>$ t-tabel ($8,452 > 1,690$)

Karena t hitung $>$ t tabel dan nilai signifikansi jauh di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa:

Terdapat pengaruh yang signifikan antara digitalisasi pengendalian belanja terhadap efisiensi pengelolaan anggaran di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara.”

Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima, yaitu bahwa penerapan digitalisasi memang membantu meningkatkan efisiensi dalam mengelola anggaran.

F. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4. 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.823 ^a	.678	.668	2.589
a. Predictors: (Constant), DIGITALISASI PENGENDALIAN BELANJA				
b. Dependent Variable: EFISIENSI PENGELOLAAN ANGGARAN				

Sumber : SPSS 26, 2025

Nilai R Square sebesar 0,678 yang dihasilkan dari uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa digitalisasi pengendalian belanja mampu menjelaskan 67,8% variasi dalam efisiensi pengelolaan anggaran, sementara 32,2% sisanya berasal dari variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini. Ini membuktikan bahwa penerapan digitalisasi di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara memberikan pengaruh yang cukup besar. Dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,668, terlihat bahwa model yang digunakan cukup stabil dan hasilnya tidak bersifat kebetulan.

4.2.3 Penerapan Digitalisasi Pengendalian Belanja

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan kepada 36 responden, penerapan digitalisasi pengendalian belanja di BKHIT Sulut mendapatkan tanggapan positif dari mayoritas responden. Terdapat beberapa indikator yang menonjol dalam proses digitalisasi, antara lain:

1. Pemahaman sistem: Sebagian besar responden menyatakan memahami sistem digitalisasi yang diterapkan.
2. Kemudahan administrasi: Digitalisasi terbukti mempermudah proses administratif, mempercepat alur persetujuan, serta membantu dalam pencatatan dan pelacakan transaksi.
3. Pelatihan dan keterlibatan: Responden mengaku mendapatkan pelatihan yang memadai serta dilibatkan secara aktif dalam penggunaan sistem digital.
4. Akurasi dan kecepatan proses: Mayoritas responden setuju bahwa sistem digital membantu mempercepat proses belanja dan pengambilan keputusan serta mengurangi kesalahan input data.

Hasil pengukuran pada skala Likert menunjukkan bahwa sebagian besar pernyataan pada indikator digitalisasi memperoleh skor antara 4 (Setuju) hingga 5 (Sangat Setuju), yang berarti bahwa digitalisasi telah berjalan dengan efektif dan memberikan pengaruh positif terhadap proses pengendalian belanja.

4.2.4 Efisiensi Pengelolaan Anggaran

Untuk mengukur efisiensi pengelolaan anggaran, digunakan indikator seperti ketepatan waktu laporan realisasi anggaran, pengendalian pengeluaran, transparansi, serta tepat sasaran penggunaan dana.

Hasil menunjukkan bahwa:

1. Ketepatan waktu dan akurasi laporan meningkat signifikan setelah penerapan digitalisasi.
2. Pengeluaran lebih terkendali, karena sistem memungkinkan pemantauan real-time dan pelaporan otomatis.
3. Pengurangan risiko pemborosan juga teridentifikasi melalui jawaban responden bahwa anggaran digunakan lebih tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
4. Peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran tercermin dari keterbukaan akses terhadap data belanja.

Rata-rata skor dari pernyataan terkait efisiensi pengelolaan anggaran juga berada pada kategori “Setuju” dan “Sangat Setuju”. Ini menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi berkontribusi nyata dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di lingkungan BKHIT Sulut.

4.2.5 Perbandingan RKA-K/L dan LRA Sebelum dan Sesudah Digitalisasi (Inpres No. 1 Tahun 2025)

BKHIT Sulawesi Utara telah menerapkan sistem digital pengendalian belanja yang terintegrasi dalam RKA-K/L (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga) dan pelaporannya melalui LRA (Laporan Realisasi Anggaran).

Berikut ini adalah data perbandingan alokasi dan realisasi anggaran (LRA) sebelum dan sesudah penerapan sistem digital:

Tabel 4. 10 Perbandingan Anggaran

Tahun Anggaran	Total RKA-K/L (Rp)	Realisasi Anggaran (LRA) (Rp)	Efisiensi (%)
2023 (sebelum digitalisasi)	5.200.000.000	5.050.000.000	2,88%
2024 (transisi awal digitalisasi)	5.000.000.000	4.780.000.000	4,4%
2025 (setelah Inpres No. 1 Tahun 2025)	4.800.000.000	4.470.000.000	6,9%

Sumber: Data internal BKHIT Sulut, diolah (2025)

Keterangan:

1. Sebelum digitalisasi (2023): Proses pelaporan dan pengendalian belanja masih bersifat manual. Efisiensi anggaran rendah karena keterlambatan verifikasi dan lemahnya kontrol internal.
2. Setelah penerapan Inpres No. 1 Tahun 2025 (2025): Efisiensi meningkat karena penggunaan sistem MINDA dan SAKTI, yang memungkinkan pemantauan real-time dan kontrol ketat terhadap pengeluaran.
3. Selisih efisiensi 2023 ke 2025 sebesar $\pm 4\%$, menunjukkan dampak nyata digitalisasi dalam pengendalian belanja pada instansi vertikal.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis Temuan Penelitian

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa digitalisasi dalam pengendalian belanja berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pengelolaan anggaran di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara. Ini dibuktikan dengan hasil regresi sederhana yang menghasilkan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$) dan koefisien regresi 0,895, yang menunjukkan adanya hubungan yang erat dan positif antara kedua variabel tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung teori yang digunakan, yakni *Technology Acceptance Model* (TAM) dan teori Transformasi Digital Sektor Publik, yang menyoroti pentingnya kemudahan dan manfaat sistem teknologi dalam mendorong penerimaan serta keberhasilan penerapan sistem tersebut. Hasil penelitian ini konsisten dengan studi yang dilakukan oleh Prasteyo (2021), yang menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi

pengendalian internal di lingkungan pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi anggaran sebesar 30%.

Secara lebih rinci, responden menunjukkan tingkat pemahaman dan penerimaan yang tinggi terhadap sistem digitalisasi yang diterapkan di BKHIT Sulut. Ini ditunjukkan melalui kuesioner yang mayoritas berada pada kategori “Setuju” hingga “Sangat Setuju” pada indikator kemudahan penggunaan, kecepatan proses belanja, pelatihan sistem, dan pengambilan keputusan berbasis digital. Hal ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi telah membantu dalam meminimalisir kesalahan input, meningkatkan transparansi dan mempercepat alur persetujuan belanja.

Dalam sisi efisiensi pengelolaan anggaran, temuan menunjukkan bahwa sistem digital mampu mendorong ketepatan waktu pelaporan, meningkatkan pengendalian pengeluaran, serta mengurangi potensi pemborosan anggaran. Responden menyatakan bahwa anggaran kini digunakan secara lebih tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Peningkatan transparansi juga menjadi salah satu capaian utama digitalisasi, dimana seluruh transaksi juga menjadi salah satu capaian utama digitalisasi, dimana seluruh transaksi terekam dengan baik dan dapat diakses dengan cepat.

Tingkat validitas dan reliabilitas dari instrumen penelitian ini sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh seluruh item kuesioner yang valid (r hitung $> r$ tabel), serta nilai Cronbach's Alpha di atas 0,9 pada kedua variabel, yang menandakan bahwa data yang diperoleh memiliki konsistensi tinggi dan sangat dapat dipercaya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem digitalisasi pengendalian belanja yang diterapkan telah memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran di lingkungan kerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara.

4.3.2 Implikasi Penelitian

Implikasi dari penelitian ini mencakup dua aspek utama, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis.

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori-teori terdahulu, termasuk Technology Acceptance Model (TAM) dan konsep Transformasi Digital di sektor publik, yang menyatakan bahwa *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* adalah elemen utama dalam mendukung keberhasilan implementasi teknologi (Davis, 1989; Suharto, 2020).

Terkait penerimaan teknologi dan pengaruhnya terhadap sistem pengelolaan keuangan di sektor publik. Temuan ini memperluas bukti empiris bahwa digitalisasi mampu memperkuat mekanisme pengendalian belanja serta mendorong prinsip *good governance* melalui efisiensi dan akuntabilitas anggaran. Ini menjadi kontribusi penting dalam pengembangan teori akuntansi pemerintah berbasis digital.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil ini menjadi dasar rekomendasi bagi instansi pemerintah, khususnya di sektor karantian dan instansi vertikal lainnya, untuk:

1. Terus mendorong transformasi digital dalam pengelolaan anggaran
2. Melakukan pelatihan intensif kepada pegawai agar mampu memanfaatkan sistem digital secara optimal.
3. Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan memastikan dukungan manajerial terhadap sistem digital
4. Menyusun kebijakan dan prosedur operasional standar (SOP) berbasis digital yang jelas untuk memastikan konsisten dan akuntabilitas.

Penelitian ini juga dapat menjadikan rujukan bagi pemerintah daerah dan lembaga vertikal lainnya untuk merancang strategi digitalisasi yang adaptif dengan lingkungan kerja dan karakteristik masing-masing lembaga, sehingga efisiensi pengelolaan anggaran dapat lebih ditingkatkan di masa depan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan sistem digitalisasi pengendalian belanja berpengaruh signifikan terhadap efisiensi dan transparansi pelaksanaan anggaran di BKHIT Sulut.

Hasil regresi menunjukkan koefisien sebesar 0,895 dengan signifikansi 0,000, yang berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan. Tujuan pertama penelitian pun tercapai. Responden menyatakan bahwa sistem digital mempercepat proses administrasi, mempermudah pencatatan dan pelaporan secara real-time. Nilai R Square sebesar 0,678 menunjukkan bahwa 67,8% efisiensi pengelolaan anggaran dipengaruhi oleh digitalisasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Prasetyo (2021) dan Djoni (2022), serta mendukung teori TAM bahwa keberhasilan sistem digital dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan kegunaan teknologi.

2. Penerapan digitalisasi mampu mengurangi risiko korupsi dan meningkatkan akurasi laporan keuangan dalam konteks pengelolaan anggaran

Responden menyatakan bahwa sistem memungkinkan transaksi tercatat otomatis dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi menjadi alat pengendalian internal yang efektif, sesuai dengan tujuan kedua penelitian. Teori Transformasi Digital Sektor Publik juga mendukung temuan ini, serta diperkuat oleh data BPK (2020) yang menunjukkan pengawasan digital mampu menekan risiko penyalahgunaan anggaran. Selain itu, sistem digital menyediakan jejak audit yang memperkuat transparansi, memudahkan proses audit, dan mempercepat perbaikan jika terjadi kesalahan.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian tentang pengaruh digitalisasi pengendalian belanja terhadap efisiensi pengelolaan anggaran di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara (BKHIT Sulut),

peneliti menyampaikan sejumlah rekomendasi baik dari sisi praktis maupun akademis, termasuk mempertimbangkan dampak jangka panjang. Salah satunya adalah pengembangan sistem yang lebih terintegrasi dengan perangkat lunak akuntansi agar kinerja menjadi lebih optimal.

1. Rekomendasi untuk Instansi Pemerintah (BKHIT Sulut):

- 1) Penguatan Infrastruktur TI: Perlu peningkatan jaringan internet, perangkat keras, dan sistem aplikasi yang terintegrasi untuk mendukung digitalisasi.
- 2) Pelatihan Berkelanjutan: Pegawai perlu dilatih secara rutin agar mampu mengoperasikan sistem digital dengan optimal.
- 3) Penyusunan SOP Digitalisasi: SOP berbasis digital diperlukan untuk menciptakan prosedur kerja yang konsisten dan akuntabel.
- 4) Monitoring dan Evaluasi: Evaluasi sistem secara berkala penting untuk mengidentifikasi kelemahan dan menyesuaikan sistem dengan kebutuhan organisasi.

2. Rekomendasi Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi ruang lingkup, metode analisis, maupun variabel yang dikaji. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan:

- 1) Perluasan Lokasi Penelitian: Disarankan meneliti instansi vertikal lain agar hasil lebih umum dan dapat mendukung kebijakan nasional.
- 2) Penelitian Jangka Panjang: Studi jangka waktu lebih lama dibutuhkan untuk mengukur dampak digitalisasi secara berkelanjutan.
- 3) Analisis Biaya-Manfaat: Perlu disertakan perhitungan rasio efisiensi secara ekonomi agar implementasi digitalisasi bisa dinilai kelayakannya dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A., & Loebbecke, J. K. (2019). *Auditing: An integrated approach*. Pearson.
- Badan Pengawas Keuangan. (2020). Laporan analisis risiko keuangan publik. Kementerian Keuangan RI.
- Davis, F. D. (1989). *Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology*. *MIS Quarterly*, 13 (3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Djoni, A. (2022). *Good governance* dan transformasi digital di instansi vertikal pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik*, 8 (1), 1–15.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hutabarat, M., Sitorus, L., & Lumbantoruan, J. (2025). Penguatan sistem digitalisasi keuangan di lembaga pemerintah: Studi evaluatif tahun pertama implementasi Inpres No. 1/2025. *Jurnal Keuangan dan Reformasi Publik*, 9(1), 101–117.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Statistik dan Evaluasi Belanja APBN Tahun Anggaran 2024–2025. Direktorat Jenderal Anggaran. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2021). *Management information systems: Managing the digital firm*. Pearson Education.
- Prasetyo, B. (2021). Hambatan dan solusi transformasi digital di sektor publik Indonesia. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 15 (3), 200–215.
- Prasetyo, B. (2021). Pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan sistem pengendalian internal di Sulawesi Utara. *Jurnal Teknologi Informasi Politeknik Negeri Manado*, 15 (3), 200–215.
- Putong, I. H. (2020). *Digitalization strategy of small and medium enterprises (SMEs) of agribusiness sector at North Sulawesi*. *Journal of Agribusiness and Technology*, 8 (2), 125–139.
- Sari, R. P., & Utami, E. W. (2021). Pengaruh digitalisasi keuangan terhadap efisiensi pengelolaan anggaran di instansi pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 10 (2), 135–149.
- Setiawan, B., & Rahmawati, N. (2020). Peningkatan akuntabilitas dan transparansi melalui digitalisasi pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 5 (1), 45–60.

- Siregar, S. S., & Effendi, R. (2021). Akuntansi sektor publik: Teori dan praktik. Salemba Empat.
- Sudarto, B. E. (2023). Analisis implementasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah. *Jurnal Keuangan Negara*, 6 (1), 88–104.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharto. (2020). Implementasi digitalisasi dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 12 (2), 45–60.
- Zein, A., Anggraini, R., & Malau, T. M. (2025). Dampak digitalisasi terhadap efisiensi anggaran di instansi daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pemerintahan Daerah*, 11 (2), 88–97

LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Kusioner Penelitian/Data Sekunder

PENGARUH PENERAPAN DIGITALISASI PENGENDALIAN BELANJA TERHADAP EFISIENSI PENGELOLAAN ANGGARAN PADA BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA

BAGIAN 1: IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama serta jabatan/posisi di BKHIT Sulut
2. Lama Bekerja di BKHIT Sulut
 - Kurang dari 1 tahun
 - 3-5 tahun
 - Lebih dari 5 tahun

BAGIAN 2: KUSIONER PENELITIAN

Keterangan:

1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Netral
4. Setuju
5. Sangat Setuju

A. KUSIONER

No	Pertanyaan	1 SST	2 TS	3 N	4 S	5 SS
DIGITALISASI PENGENDALIAN BELANJA						
1	Saya memahami sistem digitalisasi pengendalian belanja yang diterapkan di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan					
2	Digitalisasi pengendalian belanja mempermudah proses administrasi anggaran					
3	Saya terlibat aktif dalam penerapan sistem digitalisasi pengendalian belanja					
4	Pelatihan tentang sistem digital mendukung pemahaman saya dalam mengelola belanja					

5	Digitalisasi meningkatkan kecepatan dalam proses pengendalian belanja					
6	Sistem digital dapat mencegah kesalahan dalam proses belanja					
7	Penerapan digitalisasi berdampak positif terhadap efisiensi kerja					
8	Sistem digital mempercepat proses pengambilan keputusan terkait belanja					
9	Data belanja yang dihasilkan dari sistem digital lebih akurat dan mudah dilacak					
10	Digitalisasi mempercepat proses verifikasi dan persetujuan belanja					
EFISIENSI PENGELOLAAN ANGGARAN						
11	Sistem digital membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran					
12	Laporan realisasi anggaran menjadi lebih tepat waktu dan akurat					
13	Pengeluaran anggaran menjadi lebih terkendali sejak adanya digitalisasi					
14	Pengawasan terhadap penggunaan anggaran lebih mudah dilakukan melalui sistem digital					
15	Digitalisasi membantu mengurangi resiko pemborosan anggaran					
16	Semua transaksi keuangan dicatat sesuai dengan prosedur yang berlaku					
17	Anggaran digunakan secara lebih tepat sasaran setelah di digitalisasi					
18	Semua pengeluaran balai dapat dipertanggungjawabkan					
19	Terdapat peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran					
20	Anggaran digunakan secara lebih tepat sasaran setelah digitalisasi					

LAMPIRAN
TABULASI DATA PENELITIAN

Lampiran 1. 2 Hasil Tabulasi Data Penelitian

NO	KUSIONER (X)										TOTAL	KUSIONER (Y)										TOTAL
	DIGITALISASI PENGENDALIAN BELANJA											EFISIENSI PENGELOLAAN ANGGARAN										
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10		P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	5	5	5	5	3	2	4	44
2	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	39	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	34
3	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
6	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	45	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	46
7	3	4	4	4	3	2	3	4	4	5	36	4	5	4	5	5	4	5	5	5	4	46
8	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	34	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	30
9	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	48	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
11	5	5	5	5	4	4	5	4	5	4	46	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	47
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
13	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	45	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	49
14	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	48	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
17	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	47	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	46
18	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	45	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	48
19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
20	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	45	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
21	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
25	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	47	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	49
26	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	48	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	49
27	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	49	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	48
28	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	48	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	49
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
31	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
32	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	49	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	49
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	48
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50

LAMPIRAN
HASIL OLAH DATA SPSS

Lampiran 1. 3 Hasil Penelitian

A. Uji Validitas

- Variabel X

		Correlations										
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	X
P1	Pearson Correlation	1	.826**	.939**	.535**	.728**	.770**	.786**	.513**	.724**	.429**	.860**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.001	.000	.000	.000	.001	.000	.009	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
P2	Pearson Correlation	.826**	1	.880**	.468**	.603**	.579**	.663**	.487**	.702**	.520**	.784**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.004	.000	.000	.000	.003	.000	.001	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
P3	Pearson Correlation	.939**	.880**	1	.570**	.714**	.691**	.774**	.605**	.810**	.616**	.899**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
P4	Pearson Correlation	.535**	.468**	.570**	1	.609**	.530**	.802**	.442**	.546**	.691**	.755**
	Sig. (2-tailed)	.001	.004	.000		.000	.001	.000	.007	.001	.000	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
P5	Pearson Correlation	.728**	.603**	.714**	.609**	1	.776**	.833**	.508**	.592**	.661**	.865**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.002	.000	.000	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
P6	Pearson Correlation	.770**	.579**	.691**	.530**	.776**	1	.717**	.537**	.626**	.425**	.823**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.000		.000	.001	.000	.010	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
P7	Pearson Correlation	.786**	.663**	.774**	.802**	.833**	.717**	1	.520**	.762**	.733**	.923**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.001	.000	.000	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
P8	Pearson Correlation	.513**	.487**	.605**	.442**	.508**	.537**	.520**	1	.672**	.520**	.717**
	Sig. (2-tailed)	.001	.003	.000	.007	.002	.001	.001		.000	.001	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
P9	Pearson Correlation	.724**	.702**	.810**	.546**	.592**	.626**	.762**	.672**	1	.654**	.851**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
P10	Pearson Correlation	.429**	.520**	.616**	.691**	.661**	.425**	.733**	.520**	.654**	1	.764**

	Sig. (2-tailed)	.009	.001	.000	.000	.000	.010	.000	.001	.000		.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
X	Pearson Correlation	.860**	.784**	.899**	.755**	.865**	.823**	.923**	.717**	.851**	.764**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36

-Variabel Y

Correlations												
		P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	Y
P11	Pearson Correlation	1	.616**	.738**	.824**	.719**	.690**	.657**	.383*	.489**	.661**	.806**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.021	.002	.000	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
P12	Pearson Correlation	.616**	1	.729**	.799**	.756**	.763**	.750**	.482**	.561**	.552**	.847**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.003	.000	.000	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
P13	Pearson Correlation	.738**	.729**	1	.704**	.811**	.910**	.774**	.383*	.489**	.661**	.861**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.021	.002	.000	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
P14	Pearson Correlation	.824**	.799**	.704**	1	.857**	.762**	.841**	.481**	.634**	.630**	.909**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.003	.000	.000	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
P15	Pearson Correlation	.719**	.756**	.811**	.857**	1	.791**	.803**	.462**	.537**	.494**	.877**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.005	.001	.002	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
P16	Pearson Correlation	.690**	.763**	.910**	.762**	.791**	1	.810**	.352*	.530**	.634**	.869**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.035	.001	.000	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
P17	Pearson Correlation	.657**	.750**	.774**	.841**	.803**	.810**	1	.527**	.595**	.588**	.887**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.001	.000	.000	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
P18	Pearson Correlation	.383*	.482**	.383*	.481**	.462**	.352*	.527**	1	.741**	.546**	.662**
	Sig. (2-tailed)	.021	.003	.021	.003	.005	.035	.001		.000	.001	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
P19	Pearson Correlation	.489**	.561**	.489**	.634**	.537**	.530**	.595**	.741**	1	.719**	.775**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.002	.000	.001	.001	.000	.000		.000	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36

P20	Pearson Correlation	.661**	.552**	.661**	.630**	.494**	.634**	.588**	.546**	.719**	1	.775**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.002	.000	.000	.001	.000		.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Y	Pearson Correlation	.806**	.847**	.861**	.909**	.877**	.869**	.887**	.662**	.775**	.775**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

B. Reliabilitas

- Variabel X

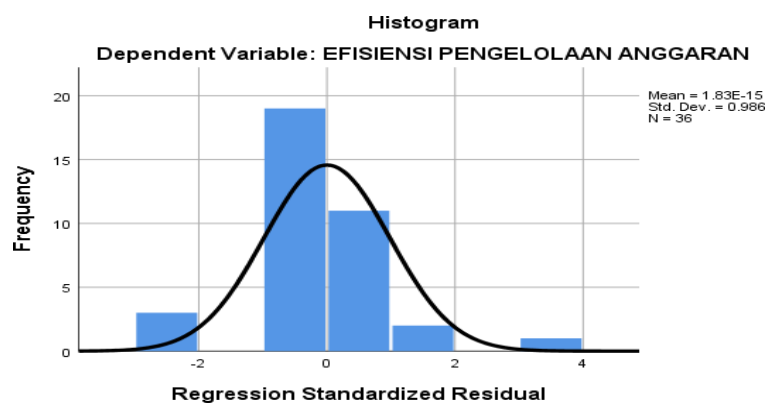
Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.938	10

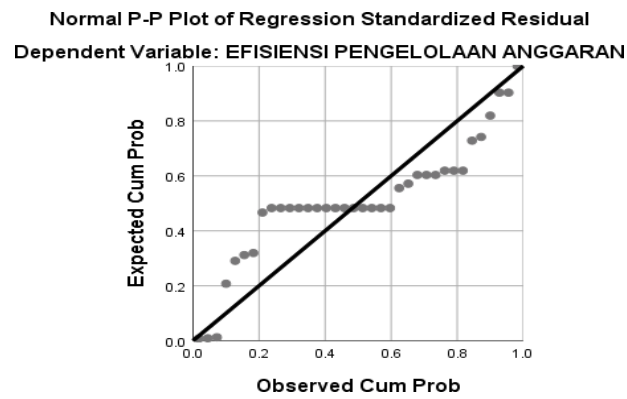
- Variabel Y

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.945	10

C. Uji Asumsi Klasik

-Uji Normalitas





D. Uji Regresi Sederhana

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.380	5.032		1.069	.292
DIGITALISASI PENGENDALIAN BELANJA	.895	.106	.823	8.452	.000

a. Dependent Variable: EFISIENSI PENGELOLAAN ANGGARAN

-Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	478.840	1	478.840	71.434	.000 ^b
	Residual	227.910	34	6.703		
	Total	706.750	35			

a. Dependent Variable: EFISIENSI PENGELOLAAN ANGGARAN

b. Predictors: (Constant), DIGITALISASI PENGENDALIAN BELANJA

-Uji Hipotesis (uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,380	5,032		1,069	,292
	Digitalisasi Pengendalian Belanja	,895	,106	,823	8,452	,000

a. Dependent Variable: Efisiensi Pengelolaan Anggaran

-Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.823 ^a	.678	.668	2.589

a. Predictors: (Constant), DIGITALISASI PENGENDALIAN BELANJA

b. Dependent Variable: EFISIENSI PENGELOLAAN ANGGARAN



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Politeknik Negeri Manado
Jurusan Akuntansi
Jl. Raya Politeknik, Buha, Kec. Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara

Surat Keterangan Cek Turnitin Skripsi/TA Mahasiswa

NO. 052/AK/PL/2025

Sehubungan dengan persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi, menerangkan bahwa nama berikut adalah mahasiswa yang telah diuji plagiarisme Skripsi/Tugas Akhir melalui fasilitas *software* "Turnitin".

Nama	:	Mihcellin Brigita Mawar Londok
NIM	:	21043045
Program Studi	:	Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi/TA	:	Pengaruh penerapan digitalisasi pengendalian belanja terhadap efisiensi pengelolaan anggaran pada balai karantina hewan, ikan dan tumbuhan sulawesi utara
Pembimbing Utama	:	Susy A. Marentek, SE.,MSA
Persentase	:	25%
Tanggal Pengecekan	:	13 Juli 2025

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Manado , 13 Juli 2025
Operator Cek Plagiasi

Dominikus Andreo Maryadi, M.Ak
NIP. 199609102024061001

**Catatan: lampirkan hasil cek plagiat*